

# KOLABORASI PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

MUHAMMAD AL FAYYAD RIZWANDA  
NPP. 32.0288

*Asdaf Bandar Lampung, Provinsi Lampung*  
*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*  
Email: [32.0288@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0288@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Irfan Uluputty, S.STP., M.Si.

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** *The main issue in this study is the suboptimal collaboration between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Social Services Agency in handling vagrants and beggars (gepeng) in Bandar Lampung City. Despite various poverty alleviation efforts, data shows that the number of gepeng has increased dramatically from 47,000 people in 2022 to 109,000 people in 2023, indicating a gap between policy and implementation. Purpose:* *This study aims to identify forms of collaboration in handling vagrants and beggars in Bandar Lampung City, Lampung Province.. Method:* *This study employs a qualitative approach using a descriptive method. Data was collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants were selected using purposive sampling and consisted of policy actors, technical implementers, affected communities, and relevant non-governmental organizations. The study used the concept of Collaborative Governance from Ansell and Gash (2008) as the analytical framework. Results/Findings:* *The study found that although there is a collaborative structure between Satpol PP and the Social Services Agency as well as social institutions such as Apik Mandiri, its implementation has not been optimal due to resource disparities, weak incentives for officers, and uneven distribution of roles. Facilitative leadership has encouraged coordination and decision-making, but the coordination system and structure between institutions need to be strengthened. Conclusion:* *Cross-sectoral collaboration in addressing street beggars in Bandar Lampung City has shown progress, but it still needs to be strengthened through improved resource balance, more inclusive leadership, and broader participation among institutions. A structured and sustainable collaborative strategy is key to resolving the complex issue of street beggars.*

**Keywords:** *Cross-Sectoral Collaboration, Community Police Unit, Social Affairs Department, Street Children and Beggars, Bandar Lampung City.*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya kolaborasi lintas sektor antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bandar Lampung. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan, data menunjukkan bahwa jumlah gepeng meningkat drastis dari 47.000 jiwa pada tahun 2022 menjadi 109.000 jiwa pada tahun 2023, menandakan adanya ketimpangan antara kebijakan dan implementasinya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi,

dan dokumentasi. Informan dipilih secara *purposive sampling* dan terdiri dari aktor kebijakan, pelaksana teknis, masyarakat terdampak, hingga organisasi non-pemerintah yang relevan. Penelitian menggunakan konsep *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008) sebagai kerangka analisis. **Hasil/Temuan:** Penelitian menemukan bahwa meskipun telah terdapat struktur kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial serta lembaga sosial seperti Apik Mandiri, pelaksanaannya belum maksimal karena adanya ketimpangan sumber daya, lemahnya insentif bagi petugas, serta belum meratanya distribusi peran. Kepemimpinan fasilitatif telah mendorong koordinasi dan pengambilan keputusan, namun perlu penguatan sistem dan struktur koordinasi antar lembaga. **Kesimpulan:** Kolaborasi lintas sektor dalam penanganan gepeng di Kota Bandar Lampung telah menunjukkan kemajuan, namun masih perlu diperkuat melalui peningkatan keseimbangan sumber daya, kepemimpinan yang lebih inklusif, dan partisipasi yang lebih luas antar lembaga. Strategi kolaboratif yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan gepeng yang kompleks.

**Kata Kunci:** Kolaborasi Lintas Sektor, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Gelandangan dan Pengemis, Kota Bandar Lampung.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kota Bandar Lampung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan di Provinsi Lampung tidak terlepas dari permasalahan sosial seperti kemiskinan dan meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis (gepeng). Gelandangan dan pengemis merupakan dua istilah yang merujuk pada individu yang hidup tanpa tempat tinggal tetap dan berada dalam kondisi yang tidak menentu. Meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam hal ketidakpastian hidup, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Gelandangan biasanya mencari belas kasihan dengan cara seperti mengamen atau melakukan aktivitas tertentu, sementara pengemis cenderung hanya mengandalkan permintaan langsung kepada orang lain tanpa melakukan kegiatan apapun. (Hutapea & Pratama, 2020; Andre, 2013) dalam (Thamrin, Pribadi, Ridho, & Hanim, 2024). Fenomena gelandangan dan pengemis sering kali muncul sebagai akibat langsung dari kemiskinan yang berkepanjangan (Santoso, Yulyana, & Aryani, 2022:215). Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, serta pembangunan infrastruktur, data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan jumlah gepeng tetap tinggi.

Tabel Data Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	
	2023	2022
Kabupaten Lampung Barat	34,73	36,2
Kabupaten Tanggamus	65,18	67,43
Kabupaten Lampung Selatan	133,67	136,21
Kabupaten Lampung Timur	148,26	149,12
Kabupaten Lampung Tengah	140,29	143,34
Kabupaten Lampung Utara	107,21	114,67
Kabupaten Way Kanan	51,26	54,28
Kabupaten Tulang Bawang	37,83	39,19

Kabupaten Pringsewu	59,29	63,17
Kabupaten Pesawaran	37,60	38,17
Kabupaten Mesuji	13,71	13,88
Kabupaten Tulang Bawang Barat	20,32	20,72
Kabupaten Pesisir Barat	21,45	21,85
Kota Bandar Lampung	87,08	90,51
Kota Metro	12,80	13,68
Povinsi Lampung	970,67	1,002,41

Menurut data BPS tersebut pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Bandar Lampung mencapai 87,08 ribu jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun Bandar Lampung merupakan kota yang berkembang, banyak penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, yang menyebabkan penambahan jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung. Selain itu, jumlah gepeng meningkat drastis yang dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel Data Gelandangan dan Pengemis Di Kota Bandar Lampung

Nomor	Tahun	Jumlah Gelandangan dan Pengemis
1	2020	46.000
2	2021	47.000
3	2022	47.000
4	2023	109.000

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah gepeng terus mengalami peningkatan dan peningkatan paling drastis terjadi pada 2022 dengan jumlah 47.000 jiwa menjadi 109.000 jiwa pada 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi hasil pembangunan belum merata dan belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Pemerintah Kota Bandar Lampung menghadapi tantangan besar dalam menciptakan sistem kolaboratif dan penanganan sosial yang efektif, terutama dalam hal integrasi antara Dinas Sosial, Satpol PP, dan lembaga terkait lainnya. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan kolaboratif yang lebih strategis untuk mengatasi kemiskinan sebagai akar dari permasalahan gepeng secara berkelanjutan.

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Belum optimalnya pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan oleh pemerintah dalam menekan angka gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bandar Lampung. Meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, seperti bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi, data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin tetap tinggi, bahkan jumlah gepeng mengalami lonjakan drastis dari 47.000 jiwa pada tahun 2022 menjadi 109.000 jiwa pada tahun 2023. Fakta ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara upaya yang telah dilakukan dengan hasil yang dicapai di lapangan. Permasalahan tersebut diperparah oleh lemahnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor antara Dinas Sosial, Satpol PP, dan lembaga terkait lainnya, sehingga penanganan gepeng belum dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan demikian,

terdapat gap antara kebijakan penanggulangan kemiskinan dan efektivitas implementasinya di tingkat daerah, khususnya dalam hal integrasi kelembagaan dan pendekatan strategis berbasis kolaborasi lintas sektor.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

1. Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah kebijakan itu sendiri, faktor lembaga, dan/atau lembaga pelaksana, serta faktor lingkungan.
2. HS, Y. T., & Kristian, I. (2021). Model collaborative dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Garut. Hasil penelitian menunjukkan Strategi penanggulangan gelandangan dan pengemis oleh Pemerintah Kabupaten Garut melalui dinas terkait dinilai belum efektif. Melalui analisis eksploratif, penelitian ini menawarkan model strategi alternatif berupa kolaborasi holistik antara pemerintah dan sektor swasta, khususnya UMKM dan perusahaan di Garut. Kolaborasi ini mencakup pemberian pinjaman kepada pelaku usaha dengan syarat mereka menyediakan lapangan kerja bagi eks gelandangan dan pengemis yang telah mengikuti pelatihan dan pembinaan sesuai kebutuhan industri.
3. Fadri, Z. (2019). Upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis (GEPENG) sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gepeng memiliki karakteristik yang berbeda dari kasus-kasus jalanan pada umumnya, sehingga penanganan gepeng harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda. Penanganan gepeng oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara terintegrasi pasti akan memberikan dampak positif dalam mitigasi gepeng, dan hal ini telah dilakukan di Yogyakarta meskipun belum sepenuhnya mengatasi masalah tersebut.
4. Maryatun, M., Raharjo, S. T., & Taftazani, B. M. (2022). Upaya Penanganan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat model penanganan gelandangan dan pengemis, yaitu sistem panti, liponsos, transit home, dan pemukiman masyarakat. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, namun model yang paling efektif adalah di luar panti, yakni dengan menyediakan tempat tinggal dan bantuan usaha. Penanganan yang optimal memerlukan pencegahan dan penanggulangan secara bersamaan, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta peningkatan kapasitas SDM. Model pemukiman masyarakat dengan akses kebutuhan hidup dan pendampingan sosial terbukti memberikan dampak terbesar.
5. Nasution, C., & Thamrin, H. (2016). Implementasi kebijakan program pembinaan dinas sosial dan tenaga kerja terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Medan. Implementasi kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tahun 2014 dilakukan sudah cukup baik. Hanya kurangnya fasilitas dan dana untuk menjalankan pembinaan bagi gelandangan dan pengemis, ini berarti Sistem komputerisasi di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) baik sehingga pekerjaan pegawai menjadi efektif.
6. Salsabila, Q., Purba, G., & Saragih, S. E. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjungpinang. hasil yang diperoleh, masih banyak orang tunawisma dan pengemis, bahkan kelompoknya semakin bertambah. Sebenarnya, rencana yang dibuat oleh Dinas Sosial cukup baik, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, hingga program. Namun, dalam praktiknya, kinerja belum optimal dan bahkan belum terealisasi sama sekali. Misalnya, fasilitas rehabilitasi dan infrastruktur di Kota Tanjung Pinang masih belum ada.

7. Sari, D. Y., & Bakar, A. A. (2020). Efektifitas Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Tulungagung (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung). Hasil penelitiannya adalah: (1) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan razia. (2) Pengemis dan gelandangan yang terkena razia didata atau diinventarisir yaitu mengisi biodata. (3) dilakukan pembinaan. (4) kembalikan lagi ke kampung halamannya. Adapun secara eksternal tidak adanya Panti Sosial serta kurangnya kerjasama dengan dinas terkait lainnya, dalam hal ini Dinas Sosial. Pengendalian pengemis dan gelandangan di kabupaten Tulungagung kurang efektif, sebab pengemis dan gelandangan setelah didata, dibina dan dipulangkan ke kampung halamannya kembali lagi mengemis dan menggelandang.
8. Waleleng, G. J., & Pratiknjo, M. (2023). Faktor-Faktor Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya orang tunawisma dan pengemis di Kota Manado adalah: Kemiskinan, Faktor Ekonomi, Batasan Fisik dan Gangguan Mental, Kebebasan dan Kenikmatan Hidup Tunawisma, Faktor Sosial Budaya, Batasan Pendidikan dan Keterampilan, Masalah Penduduk, Frustrasi Akibat Masalah Keluarga dan Rumah Tangga, serta Faktor Usia

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya. Penelitian ini memanfaatkan kondisi aktual dan melibatkan informan yang lebih beragam serta luas. Kesenjangan penelitian (research gap) yang diangkat merupakan permasalahan spesifik yang hanya ditemukan di lokasi penelitian, yaitu terkait dengan kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Perbedaan lainnya terletak pada penggunaan teori kolaborasi yang dilengkapi dengan indikator tertentu yang dirumuskan secara spesifik, sehingga menghasilkan temuan yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

## **II. METODE**

Pendekatan penelitian terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran yang merupakan gabungan keduanya. Dalam penelitian ini, penulis memilih pendekatan kualitatif karena dinilai mampu mengungkap secara mendalam realitas sosial dan fenomena kompleks, terutama terkait kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Pendekatan ini dianggap paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratif dan interpretatif, mengingat banyaknya aktor, proses, serta dinamika kelembagaan yang terlibat. Penggunaan metodologi yang tidak tepat atau keliru dapat menyebabkan penelitian ditolak dan berpotensi menghasilkan informasi yang menyesatkan (Garg, 2016). Menurut Nurdin dan Hartati (2019), metode kualitatif kadang-kadang disebut sebagai metode naturalistik karena dilakukan dalam kondisi alamiah. Metode ini juga dikenal sebagai metode etnografis dan awalnya digunakan dalam studi antropologi. Fokus utama penelitian ini, menurut Simangunsong (2017:192), adalah pada makna penelitian. Akibatnya, makna dalam penelitian kualitatif seringkali bersifat subjektif dan beragam, tergantung pada pengalaman

masing-masing peserta. Sugiyono (dalam Ardieansyah et al., 2023) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif berbasis pada filsafat postpositivisme digunakan untuk mengkaji kondisi objek secara alamiah, bukan melalui eksperimen yang terkontrol secara ketat. Salah satu aspek terpenting dalam penelitian adalah penggunaan instrumen yang tepat untuk mengumpulkan data. Menurut Bhaskar dan Manjuladevi (2016), alat penelitian seperti formulir observasi, formulir wawancara, dan kuesioner merupakan alat yang berguna untuk mengumpulkan data yang relevan. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, yakni berdasarkan kriteria bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam isu penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) melalui kolaborasi lintas sektor di Kota Bandar Lampung. Tujuan pemilihan ini adalah untuk memperoleh informasi yang mendalam dan beragam dari berbagai sudut pandang, mencakup pelaksana kebijakan, masyarakat terdampak, dan gepeng sebagai subjek utama kebijakan. Informan yang terlibat meliputi: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebagai penentu kebijakan; Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP serta Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial sebagai pelaksana teknis; pengemis dan gelandangan sebagai kelompok sasaran kebijakan; masyarakat umum untuk menangkap persepsi publik terhadap keberadaan gepeng serta efektivitas penanganannya; dan Ketua Organisasi Apik Mandiri sebagai representasi lembaga sosial non-pemerintah yang berperan dalam pembinaan gepeng. Pendekatan ini diharapkan mampu mengungkap secara menyeluruh dinamika kolaborasi lintas sektor, mulai dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaan dan dampaknya di masyarakat.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mengukur kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung menggunakan konsep Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). Menurut Ansell dan Gash, terdapat empat elemen kunci dalam Collaborative Governance, yaitu: Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan Fasilitatif, Proses Kolaborasi

#### **Kondisi Awal ekosistem internal antar instansi**

Kondisi awal ekosistem internal antar instansi menunjukkan bahwa sebelum kolaborasi dalam penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bandar Lampung berjalan optimal, terdapat tantangan mendasar yang perlu diperhatikan. Tantangan tersebut muncul dalam bentuk ketidakseimbangan sumber daya antar instansi serta rendahnya insentif untuk secara aktif terlibat dalam upaya penanganan gepeng.

Pertama, ketidakseimbangan sumber daya antar pelaku instansi seperti Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi kendala dalam pencapaian sinergi yang efektif. Ketimpangan ini mencakup jumlah personel, sarana-prasarana, serta anggaran operasional yang tidak merata. Dinas Sosial sebagai pihak yang seharusnya menjadi garda depan dalam rehabilitasi sosial, sering kali mengalami keterbatasan dalam menjalankan fungsinya karena sumber daya yang minim dibandingkan Satpol PP yang lebih fokus pada penertiban.

Kedua, insentif dalam melakukan penanganan gelandangan dan pengemis dinilai masih belum memadai. Pegawai dan petugas lapangan kurang terdorong secara moral maupun finansial untuk aktif dalam proses penanganan gepeng. Rendahnya insentif ini berdampak pada motivasi kerja, sehingga pelaksanaan tugas lebih bersifat rutinitas administratif ketimbang berbasis semangat kolaboratif.

Dengan demikian, kondisi awal yang belum ideal ini menunjukkan pentingnya perbaikan dalam distribusi sumber daya dan pemberian insentif agar ekosistem kolaboratif antar instansi dapat

terbentuk secara lebih solid dan produktif dalam menangani permasalahan gepeng di Kota Bandar Lampung.

### **Desain Kelembagaan Menangani Gelandangan dan Pengemis**

Desain kelembagaan dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung bertujuan menciptakan pelayanan yang optimal dan berkelanjutan bagi kelompok rentan ini. Keberhasilan desain tersebut sangat dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu partisipasi inklusif antar lembaga dan kejelasan aturan dasar dalam penanganan gepeng. Partisipasi inklusif diwujudkan melalui kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, dan Yayasan Apik Mandiri. Satpol PP berperan dalam menertibkan gepeng berdasarkan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum, sedangkan Dinas Sosial berfokus pada rehabilitasi sosial seperti pelatihan keterampilan dan konseling psikologis. Yayasan Apik Mandiri turut berkontribusi melalui pemberdayaan sosial dan dukungan sukarela tanpa imbalan.

Selain itu, aturan dasar yang jelas menjadi fondasi penting agar penanganan dapat dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Prosedur dan legitimasi kebijakan dalam penanganan gepeng perlu diperkuat agar setiap lembaga memiliki panduan operasional yang selaras. Dengan kolaborasi yang solid, disertai dengan dukungan regulasi dan pembagian peran yang tegas, desain kelembagaan diharapkan mampu menjawab tantangan kompleks dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis secara berkelanjutan.

### **Kepemimpinan Fasilitatif Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis**

Kepemimpinan fasilitatif tidak hanya berfokus pada pengambilan keputusan, tetapi juga pada kemampuan membangun komunikasi, mendorong partisipasi aktif, serta menjembatani kebutuhan antar lembaga seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial. Dalam konteks ini, pemimpin berfungsi sebagai penghubung, pendengar, dan pendorong yang memastikan program berjalan secara efektif dan manusiawi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, terdapat dua indikator utama yang mendukung kepemimpinan fasilitatif. Pertama, manajemen kemampuan implementasi penanganan, yang ditunjukkan melalui koordinasi rutin antar instansi, seperti rapat persiapan menghadapi peningkatan gepeng saat momen tertentu (misalnya menjelang hari besar). Kedua, kolaborasi untuk membuat keputusan yang dapat diandalkan terlihat dari konsistensi dalam pelaksanaan hasil rapat yang terealisasi di lapangan. Kolaborasi juga ditunjukkan melalui kemitraan dengan pihak eksternal, seperti Yayasan Apik Mandiri, dalam penyediaan tempat penampungan dan rehabilitasi. Secara keseluruhan, kepemimpinan fasilitatif di Kota Bandar Lampung telah berhasil membangun dasar koordinasi dan pelaksanaan yang kuat, meskipun tantangan tetap ada dalam memastikan kesinambungan dan komitmen dari semua pihak terlibat.

### **Proses Kolaborasi Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis**

Proses kolaborasi dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung merupakan elemen penting dalam upaya menciptakan solusi menyeluruh terhadap permasalahan sosial yang kompleks. Kolaborasi ini melibatkan Satpol PP yang fokus pada penertiban dan pengawasan di ruang publik, serta Dinas Sosial yang menangani aspek rehabilitasi dan pemberdayaan sosial. Dalam pelaksanaannya, proses kolaborasi ini melibatkan pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga kemanusiaan, guna mendorong para gelandangan dan pengemis kembali pada kehidupan yang layak.

Pada indikator menciptakan kepercayaan antar instansi, terlihat bahwa partisipasi inklusif telah mulai diterapkan. Satpol PP dan Dinas Sosial secara aktif mengadakan pertemuan koordinasi dan evaluasi berkala guna menjaga sinergi pelaksanaan tugas, termasuk pembentukan tim penanggulangan kemiskinan lintas sektor. Satpol PP berperan dalam menjaga ketertiban dan membawa gepeng ke tempat penampungan sementara, sedangkan Dinas Sosial memberikan layanan rehabilitasi berupa bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga akses layanan kesehatan.

Sementara itu, pada indikator pengembangan keterbukaan terhadap proses partisipasi inklusif antar instansi, komunikasi dan pembagian peran yang jelas menjadi fondasi utama kolaborasi. Forum-forum kolaboratif memungkinkan setiap lembaga menyampaikan informasi dan evaluasi, sehingga dapat membangun kepercayaan timbal balik. Langkah ini juga mendukung transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, serta menjadi wadah untuk menyelaraskan strategi dalam penanganan gepeng yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Secara umum, proses kolaborasi antar instansi menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi dalam membangun kepercayaan, keterbukaan, dan sinergi antar lembaga, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam hal struktur koordinasi dan dukungan kebijakan agar implementasi di lapangan berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

### **3.1 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi lintas sektor antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bandar Lampung belum berjalan secara optimal, meskipun telah terdapat upaya koordinatif dan kerja sama di antara pihak-pihak terkait. Kolaborasi ini terbukti masih menghadapi tantangan mendasar seperti ketimpangan sumber daya antar instansi, rendahnya insentif pegawai dalam menangani gepeng, serta belum terbangunnya kepercayaan dan sistem koordinasi yang kuat.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Suri (2017) di Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penertiban gepeng sangat dipengaruhi oleh faktor kebijakan, pelaksana, dan lingkungan. Ketidakseimbangan sumber daya dan kelemahan kelembagaan juga ditemukan dalam studi Nasution dan Thamrin (2016) di Kota Medan, yang mengungkap bahwa meskipun program pembinaan gepeng telah dijalankan cukup baik, kendala fasilitas dan dana menjadi hambatan utama. Dalam konteks Kota Bandar Lampung, hasil serupa juga ditemukan, terutama pada lemahnya pemberdayaan dan dukungan anggaran terhadap instansi pelaksana. Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Maryatun et al. (2022) dan Fadri (2019) yang menyatakan bahwa penanganan gepeng yang efektif membutuhkan pendekatan terpadu lintas lembaga, tidak hanya dari sisi penertiban tetapi juga pada aspek rehabilitasi sosial dan pemberdayaan. Namun, berbeda dengan HS & Kristian (2021) yang mengusulkan kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta (UMKM) dalam penyediaan lapangan kerja untuk eks-gepeng, penelitian ini menyoroti masih terbatasnya kolaborasi di Kota Bandar Lampung yang hanya melibatkan aktor pemerintah dan organisasi sosial seperti Apik Mandiri. Dalam hal peran kepemimpinan, temuan penelitian ini mendukung pendapat Salsabila et al. (2022) bahwa kinerja kelembagaan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan fasilitatif. Penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang mampu mendorong komunikasi antar instansi dan menjaga kesinambungan kebijakan sangat krusial dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkaya literatur terkait kolaborasi lintas sektor dalam penanganan gepeng dengan menambahkan dimensi empiris berbasis pada pengalaman

nyata di Kota Bandar Lampung. Penekanan pada pentingnya sinergi antarlembaga, kejelasan aturan, distribusi sumber daya yang merata, serta kepemimpinan fasilitatif menjadi pembeda utama yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi kebijakan penanganan gepeng yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada keberlanjutan sosial.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan keempat poin utama dalam hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa upaya penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bandar Lampung melalui kolaborasi lintas sektor telah menunjukkan langkah positif, namun masih menghadapi tantangan struktural dan operasional. Pada tahap awal, ekosistem internal antar instansi belum berjalan secara seimbang karena adanya ketimpangan sumber daya dan minimnya insentif, yang berdampak pada lemahnya sinergi dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam hal desain kelembagaan, telah terbentuk pola kolaborasi yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, dan lembaga non-pemerintah seperti Apik Mandiri, dengan peran yang cukup terstruktur dan aturan dasar yang mulai jelas. Kepemimpinan fasilitatif berperan penting dalam mengarahkan jalannya koordinasi, meningkatkan kemampuan implementasi kebijakan, serta menciptakan ruang partisipatif dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, proses kolaborasi menunjukkan kemajuan melalui peningkatan kepercayaan dan keterbukaan antar instansi, meskipun masih diperlukan penguatan dalam hal integrasi peran, komunikasi lintas sektor yang berkelanjutan, serta evaluasi bersama. Dengan demikian, keberlanjutan dan efektivitas kolaborasi dalam penanganan gepeng di Kota Bandar Lampung sangat bergantung pada keselarasan antar aktor, penguatan kapasitas kelembagaan, serta kepemimpinan yang mampu menjembatani kepentingan dan perbedaan antar institusi.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada aspek waktu dan anggaran, yang memengaruhi optimalisasi hasil yang dicapai. Keterbatasan tersebut membatasi ruang lingkup pengumpulan data serta kedalaman analisis terhadap temuan yang diperoleh. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan dengan dukungan waktu dan sumber daya yang lebih memadai guna menghasilkan kajian yang lebih menyeluruh dan mendalam.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work):** Penulis menyadari bahwa temuan dalam penelitian ini masih bersifat awal dan belum sepenuhnya mendalam. Oleh karena itu, direkomendasikan agar dilakukan penelitian lanjutan di wilayah yang sama, dengan fokus pada kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Sosial dan Satpol PP beserta seluruh jajaran atas kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi aktif dalam kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

#### VI. Daftar Pustaka

##### Buku dan Jurnal

- Ardieansyah, Asmungi, & Latip. (2023). *Metodologi Penelitian Sosial* (1st ed.). Deepublish.
- Bhaskar, S. B., & Manjuladevi, M. (2016). Methodology for research II. *Indian Journal of Anaesthesia*, 60(9), 646–651. <https://doi.org/10.4103/0019-5049.190620>
- Fadri, Z. (2019). Upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis (GEPENG) sebagai

- penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Yogyakarta. *Komunitas*, 10(1), 1-19. [UPAYA PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS \(GEPENG\) SEBAGAI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL \(PMKS\) DI YOGYAKARTA | KOMUNITAS](#)
- Garg, R. (2016). Methodology for research I. *Indian Journal of Anaesthesia*, 60(9), 640–645. <https://doi.org/10.4103/0019-5049.190619>
- HS, Y. T., & Kristian, I. (2021). Model collaborative dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Garut. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(3), 69-81. [MODEL COLLABORATIVE DALAM PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN GARUT | Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial](#)
- Maryatun, M., Raharjo, S. T., & Taftazani, B. M. (2022). Upaya Penanganan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis. *Sosio Informa*, 8(1). [UPAYA PENANGANAN PERMASALAHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS | Sosio Informa](#)
- Nasution, C., & Thamrin, H. (2016). Implementasi kebijakan program pembinaan dinas sosial dan tenaga kerja terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Medan. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4(2), 105-119. [Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan | Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area](#)
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Surabaya.
- Salsabila, Q., Purba, G., & Saragih, S. E. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 3(3), 132-141. [japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS/article/view/85](http://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS/article/view/85)
- Sari, D. Y., & Bakar, A. A. (2020). Efektifitas Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Tulungagung (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(1). [EFEKTIFITAS PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG \(Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung\) | Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara](#)
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. cet. 1. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 23rd ed. Bandung: Alfabeta.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101. [ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN DAN PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU | PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik](#)
- Thamrin, H., Pribadi, M. A., Ridho, H., & Hanim, F. (2024). Comparison of the Handling of Homeless and Beggars in Medan and Jakarta Cities. *Journal of Ecohumanism*, 3(3), 1817–1831. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3505>
- Waleleng, G. J., & Pratiknjo, M. (2023). Faktor-Faktor Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Manado. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 19(1), 717-726. [Faktor-Faktor Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Manado | AGRI-SOSIOEKONOMI](#)